**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
     1. **Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
3. Sub Bagian Perencanaan;
4. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
6. Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas:
7. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aset Desa;
8. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa.
9. Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa, terdiri atas :
10. Seksi Pengembangan Ekonomi;
11. Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa
12. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman dan Lingkungan Desa, terdiri atas :
13. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna;
14. Seksi Penataan Permukiman dan Lingkungan Desa.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

**KEPALA DINAS**

**SEKRETARIAT**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan

**Kelompok Jabatan Fungsional**

SubKeuangan dan Aset

Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman, dan Lingkungan Desa

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Penataan Permukiman dan Lingkungan Desa

Bidang Pemerintah Desa

Seksi Pembinaan Administrasi dan Aset Desa

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa

Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa

Seksi Pengembangan Ekonomi

Seksi Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa

*Sumber: Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, 2017*

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap**

* + 1. **Uraian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan konomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang antara lain :

1. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa berdasarkan rencana strategis dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
3. Mengoordinasikan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
4. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
5. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
6. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
7. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
8. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. **Bidang Pembinaan Pemerintah Desa**

Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan administrasi dan aset desa, dan pembinaan kelembagaan dan aparatur pemerintah desa. Dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pembinaan pemerintahan desa;
4. Pengelolaan administrasi bidang pembinaan pemerintahan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. **Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa**

Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya, dan kelembagaan desa. Dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa;
3. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa;
4. Pengelolaan administrasi bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. **Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman dan Lingkungan Desa**

Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman dan Lingkungan Desa mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemanfaatan sumber daya dan teknologi tepat guna, serta penataan permukiman dan lingkungan desa. Dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
3. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa;
4. Pengelolaan administrasi bidang pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.
   1. **Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** 
      1. **Sumber Daya Manusia**

Dalam upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap sebanyak 47 orang, dengan perincian 32 orang PSN dan 15 orang Non ASN.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat pendidikan** | **PNS** | | **Jumlah** |
| **L** | **P** |
| 1 | SD | 1 | 0 | - |
| 2 | SMP | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SMA | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Diploma III | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Sarjana ( S-1) | 9 | 13 | 15 |
| 6 | Magister (S-2) | 6 | 3 | 9 |
| **JUMLAH** | | **27** | **20** | **47** |

*Sumber :Dispermasdes Kabupaten Cilacap, 2017*

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sudah yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar19,14% (9 orang); berpendidikan S1 sebesar 31,91 % (15 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan diploma sebesar 6,38% (3 orang) dan pegawai dengan pendidikan SMA sebanyak 2 orang (4,25%) dan SMP 1 orang (2,1%).

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap didominasi oleh Golongan III sebanyak 21 orang, Golongan IV sebanyak 7 orang. Selengkapnya jumah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tebel berikut.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017**

| **No** | **Golongan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Golongan I | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Golongan II | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Golongan III | 8 | 12 | 21 |
| 4 | Golongan IV | 5 | 2 | 7 |
| **JUMLAH** | | **17** | **15** | **32** |

*Sumber :Dispermasdes Kabupaten Cilacap, 2017*

* + 1. **Sarana dan Prasarana**

Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap sangat baik dari sisi jumlah, kualitas prasarana dan sarana pendukung aparatur dalam melaksanakan tugas. Gambaran secara lengkap dukungan sarana dan prasarana berupa ruang kerja, peralatan kerja, sarana komunikasi dan kelengkapan penunjang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.3**

**Data Sarana dan Prasarana**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017**

| **No** | **Jenis/Nama Barang** | **Jumlah** | **Keadaan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telepon: |  |  |
|  | 1. Keluar Kantor | 1 | Baik |
|  | 1. Intern | 5 | Baik |
|  | 1. Faximail | 1 | Baik |
| 2 | Computer : |  |  |
|  | 1. CPU | 16 | Baik |
|  | 1. Monitor | 16 | Baik |
|  | 1. Printer | 16 | Baik |
| 3 | Computer Laptop | 5 | Baik |
| 4 | Computer Compatible | 1 | Baik |
| 5 | LCD Proyektor | 1 | Baik |
| 6 | LCD Monitor | 1 | Baik |
| 7 | OHP | 0 | - |
| 8 | Layar OHP | 0 | - |
| 9 | Mesin Ketik | 5 | Baik |
| 10 | AC Split | 14 | Baik |
| 11 | Peta Kabupaten | 0 | Baik |
| 12 | Kendaraan Roda 2 | 9 | Baik |
| 13 | Kendaraan Roda 4 | 7 | Baik |
| 14 | Meja | 35 | Baik |
| 15 | Kursi | 35 | Baik |
| 16 | Filing Kabinet Besi | 18 | Baik |
| 18 | Video/Kamera | 12 | Baik |
| 19 | Brangkas | 1 | Baik |

* 1. **Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2012-2017 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.4. Untuk tabel inteprestasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, disajikan pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.4**

**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET KINERJA TAHUN 2012 - 2016** | | | | | **REALISASI CAPAIAN TAHUN 2012 - 2016** | | | | | **RASIO CAPAIAN TAHUN 2012 - 2016** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Prosentase PKK Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 284 | 284 | 568 | 568 | 568 | 284 | 284 | 544 | 556 | 568 | 100 | 100 | 96 | 98 | 100 |
| 3 | Jumlah Posyandu Aktif | 2.136 | 2.140 | 2.145 | 2.150 | 2.155 | 2.136 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| 4 | LPM Berprestasi | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat | 13.247 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.247 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cakupan kelompok BP SPAM yang dibina | 82,00 | 85,00 | 96,00 | 95,00 | 98,00 | 82,00 | 85,00 | 96,00 | 95,00 | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif | 64,50 | 73,38 | 83,12 | 89,20 | 100,00 | 64,50 | 73,38 | 83,12 | 89,20 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Prosentase BUMDesa yang terbentuk | 2,60 | 4,83 | 6,69 | 8,92 | 16,73 | 2,60 | 4,83 | 6,69 | 8,92 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Prosentase Posyantekdes aktif | 4,17 | 12,50 | 20,83 | 33,33 | 40,00 | 4,17 | 12,50 | 20,83 | 33,33 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki profil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2016 dari 13 indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, PPPA dan KB Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 telah memenuhi target yang ditetapkan di awal periode, bahkan 1 indikator diantaranya melampaui target (pencapaian di atas 100%), yaitu jumlah posyandu aktif.

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Dispermades Kabupaten Cilacap untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dispermades Kabupaten Cilacap dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaaan pada Dispermades Kabupaten Cilacap disajikan pada Tabel 2.5. di bawah ini.

**Tabel 2.5.**

**Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap**

**Tahun 2012 – 2016**

| **No** | **Program Kinerja** | **Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan)** | | | | **Realisasi Pada Tahun ke- (dalam ribuan)** | | | | **Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.666.070 | 1.778.596 | 2.060.000 | 848.100 | 1.435.651 | 1.812.741 | 1.827.388 | 785.231 | 86,17 | 101,92 | 88,71 | 92,59 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.386.232 | 5.471.406 | 1.415.000 | 325.000 | 2.240.417 | 5.377.101 | 1.249.742 | 320.263 | 93,89 | 98,28 | 88,32 | 98,54 |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur; | 114.000 | 140.000 | 175.000 |  | 113.929 | 132.842 | 172.042 |  | 99,94 | 94,89 | 98,31 | #DIV/0! |
| 4 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1.255.000 | 1.050.000 | 575.000 | 590.000 | 1.052.677 | 942.452 | 519.318 | 579.479 | 83,88 | 89,76 | 90,32 | 98,22 |
| 5 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 370.000 | 355.000 | 140.000 | 150.000 | 367.116 | 311.894 | 106.503 | 145.216 | 99,22 | 87,86 | 76,07 | 96,81 |
| 6 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 535.000 | 818.600 | 1.194.054 | 781.545 | 490.066 | 806.345 | 1.118.540 | 724.621 | 91,60 | 98,50 | 93,68 | 92,72 |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | - | 175.000 |  | 150.000 | - | 175.000 |  | 148.068 | #VALUE! | 100,00 | #DIV/0! | 98,71 |
| 8 | Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan |  | 850.000 | 850.000 | 835.000 |  | 846.720 | 747.585 | 785.000 | #DIV/0! | 99,61 | 87,95 | 94,01 |
| 9 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan |  | 50.000 | 75.000 | 100.000 |  | 49.987 | 74.493 | 97.854 | #DIV/0! | 99,97 | 99,32 | 97,85 |
| 10 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |  |  |  | - |  |  |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |
| 11 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  | 100.000 |  |  |  | 75.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75,00 |